

EVALUASI AMENITIES RUANG PUBLIK PADA TAMAN HUTAN KOTA GBK JAKARTA SEBAGAI DASAR PENGEMBANGAN RUANG PUBLIK YANG INKLUSIF

Gladys Puspa Ramasta

Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik
Universitas Muhammadiyah Surakarta
d300220215@student.ums.ac.id

Muhammad Siam Priyono Nugroho

Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik
Universitas Muhammadiyah Surakarta
mospn205@ums.ac.id

ABSTRAK

Taman Hutan Kota Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, merupakan ruang publik perkotaan yang dimanfaatkan oleh masyarakat dengan kebutuhan yang beragam. Dalam konteks tersebut, kualitas amenities ruang publik seperti toilet umum, toilet difabel, dan musholla memiliki peran penting dalam menunjang kenyamanan, aksesibilitas, dan keberlanjutan penggunaan ruang publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kondisi amenities ruang publik di Taman Hutan Kota GBK dengan menggunakan prinsip Universal Design sebagai dasar analisis serta standar perancangan fasilitas publik sebagai acuan penilaian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui observasi lapangan, dokumentasi visual, dan studi literatur. Analisis dilakukan dengan membandingkan kondisi eksisting fasilitas toilet umum, toilet difabel, dan musholla terhadap prinsip Universal Design dan ketentuan perancangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa amenities ruang publik di Taman Hutan Kota GBK belum sepenuhnya memenuhi prinsip inklusivitas. Temuan utama meliputi keterbatasan kapasitas toilet umum, ketiadaan fasilitas toilet difabel, serta musholla dengan luasan dan fasilitas pendukung yang terbatas, sehingga belum mampu mengakomodasi kebutuhan pengguna secara setara. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merumuskan rekomendasi desain berupa penataan ulang layout fasilitas, penyediaan toilet difabel, serta peningkatan aksesibilitas dan keterbacaan ruang sebagai upaya peningkatan kualitas amenities ruang publik yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

KEYWORDS:

amenities ruang publik, Universal Design, inklusivitas, aksesibilitas, toilet umum, toilet difabel, musholla.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Ruang terbuka hijau perkotaan berperan strategis sebagai wadah aktivitas sosial, rekreasi, dan interaksi masyarakat. Sebagai ruang publik berskala kota, kualitas lingkungan binaan di dalamnya, termasuk penyediaan amenities, menjadi faktor penting dalam menunjang kenyamanan, kemudahan akses, serta keberlanjutan penggunaan ruang oleh seluruh kelompok Masyarakat (Carmona, Heath, Oc, & Tiesdell, 2008).

Penyediaan amenities ruang publik yang aksesibel semakin meningkat seiring dengan besarnya jumlah penyandang disabilitas. World Health Organization (WHO)

mencatat bahwa sekitar 15% populasi dunia merupakan penyandang disabilitas, atau lebih dari 1,2 miliar jiwa. Di Indonesia, jumlah penyandang disabilitas diperkirakan mencapai sekitar 41 juta jiwa dan diproyeksikan terus meningkat akibat bertambahnya usia harapan hidup serta meningkatnya prevalensi penyakit tidak menular. Kondisi ini menegaskan pentingnya perancangan lingkungan binaan yang inklusif dan dapat diakses secara setara (Organization, 2022).

Lingkungan yang tidak dirancang dengan mempertimbangkan aksesibilitas berpotensi menciptakan hambatan fisik dan sosial yang membatasi partisipasi penyandang disabilitas dalam ruang publik. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan

fasilitas sanitasi publik dan ketiadaan toilet difabel merupakan permasalahan umum di ruang publik perkotaan, yang berdampak pada keterbatasan akses dan kenyamanan pengguna (Greed, 2003). Sebaliknya, penerapan prinsip inklusivitas dalam perancangan amenities terbukti dapat meningkatkan kualitas ruang publik serta kemandirian pengguna dengan kebutuhan khusus (Imrie & Hall, 2001).

Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang menegaskan hak setiap warga negara untuk memperoleh akses yang setara terhadap fasilitas publik. Dalam konteks perancangan, prinsip *Universal Design* dipandang sebagai pendekatan yang relevan karena menempatkan aksesibilitas sebagai bagian integral dari kualitas ruang, bukan sebagai elemen tambahan (Steinfeld & Maisel, 2012).

Selain itu, disabilitas bukanlah kondisi yang hanya dialami oleh kelompok tertentu. Setiap individu berpotensi mengalami disabilitas, baik sementara maupun permanen, sepanjang siklus kehidupannya. Oleh karena itu, perancangan amenities ruang publik yang aksesibel pada dasarnya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan seluruh pengguna, bukan semata-mata kelompok tertentu (Steinfeld & Maisel, 2012).

Salah satu ruang terbuka hijau dengan intensitas kunjungan tinggi di Jakarta adalah Taman Hutan Kota Gelora Bung Karno (GBK). Kawasan ini dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas olahraga, rekreasi, dan kegiatan komunitas. Dalam konteks tersebut, amenities seperti toilet umum, toilet difabel, dan musholla merupakan fasilitas pelayanan dasar yang berperan penting dalam menunjang aktivitas pengunjung serta mencerminkan tingkat inklusivitas ruang publik. Penelitian mengenai taman kota di Indonesia menunjukkan bahwa kualitas dan ketersediaan amenities memiliki pengaruh signifikan terhadap kenyamanan dan durasi penggunaan ruang publik (Putri & Rahmi, 2021).



Gambar 1. Suasana di Taman Hutan Kota, GBK
(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2025)

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan evaluasi terhadap amenities ruang publik di Taman Hutan Kota GBK sebagai dasar perumusan pengembangan fasilitas yang lebih fungsional, nyaman, dan inklusif. Evaluasi ini diharapkan dapat menjadi landasan dalam penyusunan usulan pengembangan toilet umum, toilet difabel, dan musholla yang mampu melayani kebutuhan seluruh lapisan masyarakat secara setara dan berkelanjutan.

TINJAUAN PUSTAKA

***Universal Design* dalam Perancangan Fasilitas Publik**

Universal Design merupakan pendekatan perancangan yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan dan fasilitas yang dapat digunakan oleh semua orang, tanpa memerlukan adaptasi tambahan atau desain khusus. Konsep ini dikembangkan oleh *Center for Universal Design* (1997) yang merumuskan tujuh prinsip utama *Universal Design*, yaitu

1. *Equitable use,*
2. *Flexibility in use,*
3. *Simple and intuitive use,*
4. *Perceptible information,*
5. *Tolerance for error,*
6. *Low physical effort,* dan
7. *Size and space for approach and use.*

Dalam konteks amenities ruang publik, *Universal Design* menjadi kerangka teoritis yang relevan untuk mengevaluasi dan merancang fasilitas seperti toilet umum, toilet difabel, dan musholla. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada penyandang disabilitas, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan kelompok pengguna lain seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, serta pengguna dengan

keterbatasan sementara. Dengan demikian, *Universal Design* berperan sebagai pendekatan inklusif dalam perancangan fasilitas publik.

Aksesibilitas dalam Fasilitas Publik

Aksesibilitas dalam fasilitas publik mengacu pada kemudahan bagi seluruh individu untuk mencapai, memasuki, dan menggunakan fasilitas secara aman dan mandiri. Steinfeld dan Maisel (2012), menyatakan bahwa aksesibilitas merupakan komponen penting dalam *Universal Design* yang bertujuan untuk mengurangi hambatan fisik dan sosial dalam lingkungan binaan (Steinfeld & Maisel, 2012).

Dalam ruang publik, aksesibilitas mencakup beberapa aspek utama, antara lain:

- Jalur sirkulasi yang aman dan mudah dilalui,
- Dimensi ruang yang memadai untuk pergerakan dan manuver,
- Keberadaan elemen bantu seperti *handrail*, *signage*, dan material lantai yang tidak licin.

Lingkungan binaan yang tidak aksesibel berpotensi meningkatkan tingkat ketergantungan pengguna dan menghambat partisipasi sosial, khususnya bagi penyandang disabilitas. Sebaliknya, fasilitas publik yang dirancang berdasarkan prinsip aksesibilitas dapat meningkatkan kenyamanan, kemandirian, dan kualitas pengalaman ruang bagi seluruh pengguna.

Ruang Publik dan Amenities Ruang Publik

Ruang publik merupakan ruang yang dapat diakses dan digunakan oleh masyarakat secara luas untuk berbagai aktivitas sosial, rekreasi, dan interaksi komunitas. Carr, Francis, Rivlin, & Stome (1991) menyatakan bahwa ruang publik yang baik harus mampu mengakomodasi kebutuhan beragam pengguna serta memberikan rasa nyaman, aman, dan inklusif. Dalam konteks perkotaan, ruang publik berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memperkuat interaksi sosial (Carr, Francis, Rivlin, & Stome, 1991).

Amenities ruang publik merupakan fasilitas pendukung yang disediakan untuk

menunjang fungsi dan kenyamanan ruang publik, seperti toilet umum, fasilitas ibadah, tempat duduk, pencahayaan, dan fasilitas pelayanan dasar lainnya. Keberadaan amenities yang memadai berpengaruh terhadap durasi kunjungan, intensitas penggunaan, serta kualitas pengalaman pengguna ruang publik. Sebaliknya, keterbatasan amenities dapat menurunkan tingkat kenyamanan dan menghambat pemanfaatan ruang publik secara optimal.

Toilet Umum sebagai Fasilitas Pelayanan Dasar

Toilet umum merupakan salah satu amenities utama dalam ruang publik yang bersifat esensial. Ching (2008) menyatakan bahwa fasilitas sanitasi perlu dirancang dengan mempertimbangkan aspek fungsional, kenyamanan, kebersihan, dan kemudahan akses. Dalam ruang publik dengan intensitas kunjungan tinggi, toilet umum harus mampu melayani kebutuhan pengguna dalam jumlah besar melalui tata letak yang jelas, sirkulasi yang baik, serta penggunaan material yang mendukung kebersihan dan kemudahan perawatan (Ching F. D., 2008).

Selain aspek perancangan, standar perancangan toilet umum juga menjadi acuan penting dalam menjamin kenyamanan dan kesehatan pengguna. Neufert (2019) menekankan pentingnya dimensi bilik, ruang gerak, dan sirkulasi yang memadai pada fasilitas sanitasi publik. Keterbatasan jumlah dan kapasitas toilet umum berpotensi menurunkan kenyamanan pengunjung serta menimbulkan permasalahan kebersihan dan kesehatan lingkungan, sehingga evaluasi terhadap toilet umum menjadi bagian penting dalam kajian kualitas amenities ruang publik (Neufert, 2019).

Toilet Difabel dan Aksesibilitas Fasilitas Publik

Toilet difabel merupakan fasilitas yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas dan pengguna dengan keterbatasan mobilitas. Keberadaan toilet difabel di ruang publik tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga menunjukkan komitmen terhadap prinsip kesetaraan dan inklusivitas.

Secara regulatif, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menegaskan bahwa penyandang disabilitas berhak memperoleh aksesibilitas terhadap fasilitas publik. Ketentuan tersebut diperkuat melalui Permen PUPR No. 14/PRT/M/2017 yang mengatur persyaratan kemudahan bangunan gedung, termasuk dimensi ruang, kemudahan manuver, dan perlengkapan pendukung pada toilet difabel. Ketiadaan toilet difabel di ruang publik dapat menjadi hambatan signifikan bagi penyandang disabilitas dalam memanfaatkan ruang publik secara mandiri dan setara.

Musholla sebagai Fasilitas Ibadah di Ruang Publik

Musholla merupakan fasilitas ibadah yang penting dalam ruang publik di Indonesia, mengingat mayoritas penduduk beragama Islam. Musholla yang baik perlu memenuhi aspek kenyamanan, kapasitas, kebersihan, serta kesesuaian tata ruang, termasuk orientasi ruang, sirkulasi pengguna, dan keterpisahan antara area salat dan area wudu.

Dalam prinsip perancangan arsitektur, musholla sebagai fasilitas ibadah publik sebaiknya dirancang dengan mempertimbangkan kapasitas pengguna dan kelancaran sirkulasi agar tidak mengganggu aktivitas ibadah. Neufert (2019) menekankan bahwa ruang ibadah perlu mengakomodasi kebutuhan pengguna secara proporsional dan nyaman. Orientasi pintu musholla yang tidak langsung menghadap kiblat serta ketersediaan fasilitas wudu yang memadai menjadi faktor penting dalam mendukung kenyamanan dan kekhusyukan ibadah. Musholla yang tidak dirancang secara optimal berpotensi menurunkan kualitas pelayanan ruang publik, terutama bagi pengguna dengan kebutuhan waktu ibadah tertentu (Neufert, 2019).

METODE PENELITIAN

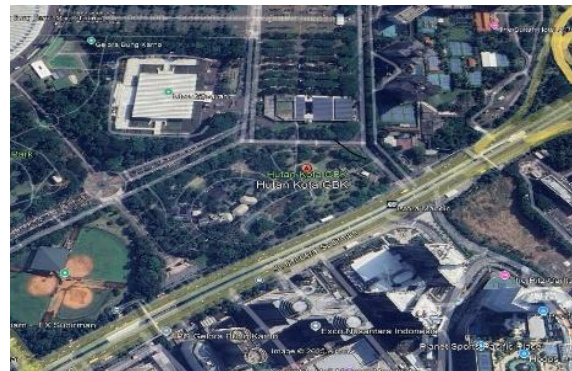
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan evaluatif. Metode ini dipilih untuk mengkaji kondisi eksisting amenities ruang publik di Taman Hutan Kota Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, khususnya fasilitas toilet umum, toilet

difabel, dan musholla. Pendekatan kualitatif deskriptif memungkinkan peneliti untuk memahami kondisi ruang secara langsung melalui pengamatan lapangan serta mengaitkannya dengan prinsip-prinsip perancangan yang relevan dalam konteks ruang publik inklusif.

Objek dan Lokasi Penelitian

Objek penelitian ini adalah amenities ruang publik yang terdapat di kawasan Taman Hutan Kota GBK, Jakarta, yang meliputi:

1. Toilet umum
2. Toilet difabel
3. Musholla beserta fasilitas wudu



Gambar 2. Lokasi Penelitian
(Sumber: Google Earth Pro, 2025)



Gambar 3. Fasilitas Amenities
(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2025)

Objek penelitian difokuskan pada fasilitas amenities yang berada di area publik dan mudah diakses oleh pengunjung, khususnya di sekitar pintu masuk dan jalur pedestrian utama kawasan Taman Hutan Kota GBK. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada intensitas penggunaan fasilitas serta keterkaitannya dengan aktivitas utama pengunjung taman. Dokumentasi lokasi dan

kondisi fisik fasilitas digunakan untuk menunjukkan posisi amenities terhadap sistem sirkulasi kawasan dan menjadi dasar dalam proses evaluasi serta analisis.

Waktu dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilaksanakan dalam rentang waktu September hingga Desember 2025. Observasi lapangan dilakukan secara bertahap, dimulai dari observasi awal untuk memahami kondisi umum kawasan, kemudian dilanjutkan dengan observasi terfokus pada amenities ruang publik berupa toilet umum, toilet difabel, dan musholla. Observasi dilakukan pada hari kerja (*weekday*) dan akhir pekan (*weekend*) untuk melihat variasi kondisi penggunaan fasilitas dalam konteks operasional ruang publik.

Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi:

1. **Observasi lapangan**, dengan mencatat kondisi fisik fasilitas, lokasi, aksesibilitas, sirkulasi pengguna, keterhubungan fasilitas dengan jalur pergerakan utama taman, serta kapasitas dan pola penggunaan fasilitas.
2. **Dokumentasi**, berupa foto fasilitas toilet, musholla, area wudu, dan jalur akses menuju fasilitas. Dokumentasi visual digunakan sebagai data pendukung untuk memperkuat hasil observasi dan analisis.
3. **Studi literatur**, melalui penelusuran buku, jurnal ilmiah, dan peraturan yang berkaitan dengan *Universal Design*, aksesibilitas, serta perancangan fasilitas publik.

Pengukuran yang dilakukan bersifat estimatif, yaitu dengan memperkirakan dimensi ruang, kapasitas penggunaan, dan jarak berdasarkan pengamatan langsung di lapangan serta perbandingan dengan standar perancangan fasilitas publik. Pengukuran ini tidak dimaksudkan sebagai pengukuran teknis rinci, melainkan sebagai dasar evaluasi kualitatif terhadap kesesuaian fasilitas dengan prinsip *Universal Design*.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan tahapan sebagai berikut:

1. Mencatat kondisi eksisting amenities ruang publik berdasarkan hasil observasi lapangan.
2. Mengevaluasi fasilitas toilet umum, toilet difabel, dan musholla menggunakan indikator *Universal Design* yang disusun berdasarkan kajian literatur.
3. Mensintesis hasil evaluasi untuk mengidentifikasi pola permasalahan yang menunjukkan defisit inklusivitas amenities ruang publik.
4. Merumuskan arahan desain sebagai dasar dalam penyusunan usulan pengembangan dan redesain fasilitas.

Untuk memperkuat validitas analisis, penelitian ini juga melakukan perbandingan konseptual dengan studi terdahulu mengenai penyediaan dan aksesibilitas amenities ruang publik. Penelitian tentang toilet publik menunjukkan bahwa fasilitas di ruang terbuka hijau dan kawasan perkotaan sering kali belum memenuhi aspek aksesibilitas, baik dari sisi ketersediaan, keterbacaan lokasi, maupun pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas, sehingga diperlukan evaluasi fasilitas berdasarkan fungsi dan kemudahan akses. (Greed, 2007)

Selain itu, penelitian mengenai penerapan *Universal Design* pada taman kota di Indonesia menunjukkan bahwa amenities ruang publik masih banyak berorientasi pada pemenuhan fungsi dasar dan belum sepenuhnya memperhatikan kualitas ruang yang inklusif bagi seluruh pengguna. Temuan-temuan tersebut digunakan sebagai acuan perbandingan konseptual untuk menilai kondisi amenities di Taman Hutan Kota GBK dan merumuskan arahan pengembangannya. (Putri & Rahmi, 2021)

Batasan Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada kajian kondisi fisik dan fungsional amenities ruang publik di kawasan Taman Hutan Kota GBK. Penelitian tidak membahas aspek manajemen, operasional, maupun kebijakan pengelolaan secara mendalam. Hasil penelitian merepresentasikan kondisi fasilitas pada periode observasi yang dilakukan.

HASIL PENELITIAN

Kondisi Eksisting Amenities Ruang Publik di Taman Hutan Kota GBK



Gambar 4. Eksisting Lokasi Penelitian
(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2025)

1. Toilet umum

Berdasarkan hasil observasi lapangan, fasilitas toilet umum di Taman Hutan Kota GBK berada pada satu klaster bangunan yang terletak di dekat pintu masuk kawasan. Fasilitas ini terdiri dari dua bilik toilet laki-laki dan dua bilik toilet perempuan, dilengkapi dengan satu wastafel pada toilet laki-laki dan dua wastafel pada toilet perempuan. Secara umum, akses menuju toilet mudah dipahami dengan lebar selasar sekitar ± 1.5 m.

Secara kuantitas, jumlah bilik toilet tergolong terbatas jika dibandingkan dengan fungsi taman sebagai ruang publik yang digunakan oleh berbagai kelompok pengguna. Pada saat observasi, tidak ditemukan antrian pengguna, namun kondisi ini dipengaruhi oleh faktor cuaca dan rendahnya intensitas pengunjung. Dalam kondisi penggunaan tinggi, keterbatasan jumlah bilik berpotensi menimbulkan antrian dan menurunkan tingkat kenyamanan pengguna.



Gambar 5. Interior Toilet Wanita
(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2025)



Gambar 6. Sirkulasi Toilet Umum
(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2025)

Evaluasi Toilet Umum Berdasarkan Prinsip *Universal Design*

Evaluasi toilet umum dilakukan dengan menggunakan indikator *Universal Design* serta pembanding standar perancangan fasilitas public seperti *Neufert Architects' Data*, Permenkes No. 3 Tahun 2014, Panduan Ilustratif Regulasi Bangunan & Kawasan Jakarta: *Desain Universal*, serta Permen PUPR No. 14/PRT/M/2017.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa toilet umum telah memenuhi aspek *simple and intuitive use* karena akses dan tata letak relatif mudah dipahami oleh pengguna. Namun demikian, beberapa prinsip *Universal Design* lainnya belum sepenuhnya terpenuhi, terutama terkait kecukupan ruang dan kesetaraan penggunaan.

Tabel 1. Evaluasi Toilet Umum			
Prinsip UD	Indikator Analisis	Kondisi Eksisting	Keterangan
<i>Equitable use</i>	Toilet dapat digunakan semua pengunjung	Kurang terpenuhi	Tidak tersedia bilik difabel
<i>Flexibility in use</i>	Fleksibel untuk berbagai usia	Kurang terpenuhi	Dimensi bilik terbatas
<i>Simple and intuitive use</i>	Tata letak mudah dipahami	Terpenuhi	Sirkulasi jelas
<i>Perceptible information</i>	Signage jelas	Terpenuhi	Jelas, namun tidak ada signage
<i>Tolerance for error</i>	Keamanan pengguna	Kurang terpenuhi	Tidak ada fitur

			pengaman khusus
Low physical effort	Kemudahan penggunaan	Terpenuhi	Akses datar
Size and space for approach and use.	Ruang Gerak memadai	Terpenuhi	Ruang Gerak memadai

2. Toilet Difabel

Hasil observasi menunjukkan bahwa toilet difabel tidak tersedia di kawasan Taman Hutan Kota GBK. Penelusuran dilakukan dengan menyusuri area taman untuk memastikan keberadaan fasilitas tersebut, namun tidak ditemukan bilik toilet dengan dimensi khusus maupun signage yang menunjukkan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

Ketiadaan toilet difabel ini menjadi temuan penting karena secara langsung membatasi akses sanitasi bagi penyandang disabilitas dan pengguna dengan keterbatasan mobilitas.

Evaluasi Toilet Difabel Berdasarkan Prinsip *Universal Design*

Evaluasi fasilitas toilet difabel dilakukan dengan menggunakan prinsip *Universal Design* serta mengacu pada ketentuan aksesibilitas fasilitas publik yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung, toilet difabel merupakan fasilitas dasar yang wajib disediakan pada bangunan dan kawasan publik untuk menjamin kemudahan, keamanan, dan kemandirian penyandang disabilitas.

Selain itu, ketentuan tersebut sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang menegaskan hak penyandang disabilitas atas aksesibilitas terhadap fasilitas publik. Oleh karena itu, keberadaan dan kualitas toilet difabel menjadi indikator penting dalam menilai tingkat inklusivitas amenities ruang publik.

Tabel 2. Evaluasi Toilet Difabel

Prinsip UD	Indikator Analisis	Kondisi Eksisting	Keterangan
------------	--------------------	-------------------	------------

Equitable use	Toilet difabel tidak tersedia	Tidak terpenuhi	Toilet tidak tersedia
Flexibility in use	Akses kursi roda	Tidak terpenuhi	Tidak ada fasilitas
Simple and intuitive use	Tata letak jelas	Tidak terpenuhi	Fasilitas tidak tersedia
Perceptible information	Signage difabel	Tidak terpenuhi	Tidak ada signage
Tolerance for error	Keamanan pengguna	Tidak terpenuhi	Tidak ada handrail
Low physical effort	Kemudahan penggunaan	Tidak terpenuhi	Tidak tersedia
Size and space for approach and use.	Dimensi sesuai standar	Tidak terpenuhi	Tidak tersedia

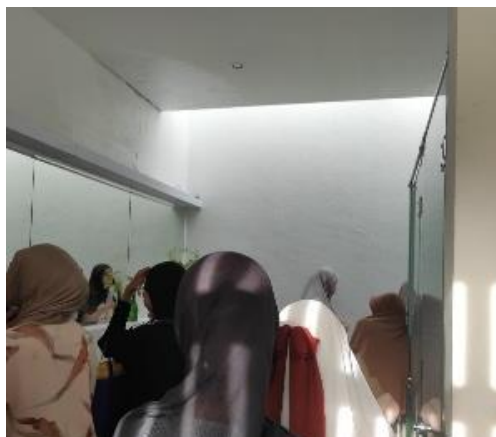
3. Musholla dan Fasilitas Wudu

Musholla di Taman Hutan Kota GBK berada dalam satu klaster bangunan dengan toilet umum dan terletak di sebelah kiri toilet laki-laki. Berdasarkan observasi, musholla memiliki luasan ruang sekitar $\pm 2 \times 3$ m dengan kapasitas kurang lebih 6-8 orang. Orientasi pintu musholla menghadap langsung ke arah kiblat, yang berpotensi mengganggu alur sirkulasi dan kenyamanan aktivitas ibadah.



Gambar 7. Interior Musholla
(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2025)

Fasilitas musholla dilengkapi dengan signage dan tempat penyimpanan mukena, namun belum dilengkapi dengan elemen pendukung kenyamanan seperti karpet salat. Selain itu, fasilitas wudu yang terhubung dengan musholla hanya menyediakan satu kran, sehingga berpotensi menimbulkan antrean pada waktu salat.



Gambar 8. Antrian Wudu
(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2025)

Dalam konteks perancangan ruang ibadah publik, Neufert (2019) menekankan pentingnya pertimbangan kapasitas pengguna, orientasi ruang, serta sirkulasi yang tidak mengganggu aktivitas ibadah. Jika dikaitkan dengan konteks musholla sebagai fasilitas ibadah publik, kondisi musholla eksisting menunjukkan bahwa fasilitas ini masih bersifat pemenuhan fungsi dasar dan belum sepenuhnya mengakomodasi intensitas penggunaan. (Neufert, 2019)

Evaluasi Musholla Berdasarkan Prinsip *Universal Design*

Evaluasi musholla sebagai fasilitas ibadah publik dilakukan dengan menggunakan prinsip *Universal Design* serta mengacu pada prinsip perancangan ruang ibadah secara umum. Dalam *Neufert Architects' Data*, prinsip perancangan ruang ibadah menekankan pentingnya pertimbangan kapasitas pengguna, orientasi ruang, serta sirkulasi yang tidak mengganggu aktivitas ibadah.

Dalam konteks musholla sebagai bagian dari amenities ruang publik, penerapan prinsip-prinsip tersebut menjadi penting untuk menjamin kenyamanan, kemudahan akses, dan kelancaran aktivitas ibadah bagi seluruh pengguna. Oleh karena itu, musholla dievaluasi tidak hanya dari keberadaannya, tetapi juga dari kesesuaiannya terhadap prinsip ruang ibadah publik dan *Universal Design*.

Tabel 3. Evaluasi Musholla dan Fasilitas Wudu

Prinsip UD	Indikator Analisis	Kondisi Eksisting	Keterangan
<i>Equitable use</i>	Musholla dapat digunakan oleh semua pengunjung	Kurang terpenuhi	Akses belum ramah lansia dan difabel
<i>Flexibility in use</i>	Dapat mengakomodasi variasi pengguna	Kurang terpenuhi	Tidak tersedia area salat duduk
<i>Simple and intuitive use</i>	Tata ruang mudah dipahami	Kurang terpenuhi	Sirkulasi masuk-keluar bercampur
<i>Perceptible information</i>	Arah kiblat dan informasi jelas	Terpenuhi	Arah kiblat tersedia
<i>Tolerance for error</i>	Tata ruang meminimalkan kesalahan	Tidak terpenuhi	Pintu keluar dan masuk mengarah ke kiblat
<i>Low physical effort</i>	Akses dan wudu nyaman	Tidak terpenuhi	Tempat wudu hanya tersedia satu kran
<i>Size and space for approach and use.</i>	Luasan ruang memadai	Tidak terpenuhi	Ruang salat sempit

Berdasarkan hasil penelitian yang disajikan melalui narasi dan tabel evaluasi, dapat disimpulkan bahwa amenities ruang publik di Taman Hutan Kota GBK masih menunjukkan keterbatasan dari aspek kapasitas, aksesibilitas, dan inklusivitas. Keterbatasan tersebut membentuk pola permasalahan yang konsisten dan menjadi dasar untuk pembahasan lebih lanjut serta perumusan indikator *Universal Design* dan usulan pengembangan desain.

PEMBAHASAN

Fasilitas Toilet Umum

Berdasarkan hasil evaluasi menggunakan indikator *Universal Design*, toilet umum di Taman Hutan Kota GBK belum sepenuhnya memenuhi prinsip aksesibilitas. Prinsip *equitable use* dan *size and space for approach and use* menunjukkan kondisi yang kurang terpenuhi, terutama karena tidak tersedianya

bilik toilet difabel serta keterbatasan ruang gerak di dalam bilik. Kondisi ini berpotensi membatasi kenyamanan dan akses pengguna dengan kebutuhan khusus dalam memanfaatkan fasilitas toilet secara mandiri.

Dalam konteks ruang publik berskala kota, keterbatasan fasilitas toilet umum dapat memengaruhi kualitas pengalaman ruang publik, khususnya bagi pengguna dengan keterbatasan fisik dan kelompok rentan lainnya.

Ketiadaan Toilet Difabel

Berdasarkan hasil evaluasi menggunakan prinsip *Universal Design*, ketiadaan toilet difabel di kawasan Taman Hutan Kota GBK menunjukkan bahwa prinsip *equitable use* dan *size and space for approach and use* belum terpenuhi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa fasilitas sanitasi yang tersedia belum dirancang untuk dapat digunakan secara setara oleh seluruh pengguna, khususnya penyandang disabilitas dan pengguna dengan keterbatasan mobilitas.

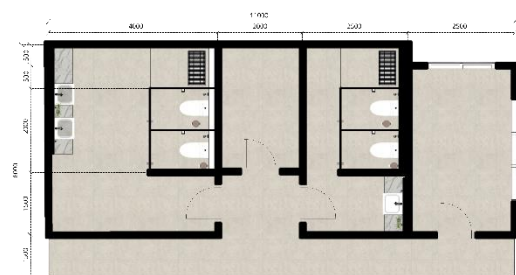
Jika dikaitkan dengan Permen PUPR No.14/PRT/M/2017 tentang persyaratan kemudahan bangunan gedung, toilet difabel merupakan bagian dari fasilitas dasar yang wajib disediakan untuk menjamin aksesibilitas dan kemandirian penyandang disabilitas. Dalam kerangka regulasi nasional, kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara prinsip aksesibilitas yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dengan kondisi fasilitas yang tersedia di lapangan.

Rekomendasi Desain Amenities Ruang Publik

Berdasarkan temuan penelitian terkait keterbatasan fasilitas toilet umum, ketiadaan toilet difabel, serta belum optimalnya aspek inklusivitas fasilitas ibadah di Taman Hutan Kota GBK, diperlukan perumusan rekomendasi desain dan kebijakan sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi. Rekomendasi ini disusun dengan membandingkan kondisi desain awal (eksisting) dengan usulan desain akhir sebagai bentuk penerapan prinsip *Universal Design* dalam perancangan amenities ruang publik.

Evaluasi *Layout* Eksisting

Pada kondisi eksisting, layout fasilitas toilet menunjukkan keterbatasan ruang gerak dan tidak tersedianya bilik toilet difabel. Pola sirkulasi yang sempit, pembagian ruang yang kaku, serta ketiadaan ruang manuver menyebabkan fasilitas toilet hanya dapat digunakan secara optimal oleh pengguna tanpa keterbatasan fisik. Kondisi ini mengindikasikan belum terpenuhinya prinsip *equitable use* serta *size and space for approach and use*, sehingga aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, lansia, dan pengguna dengan kebutuhan khusus lainnya menjadi terbatas.



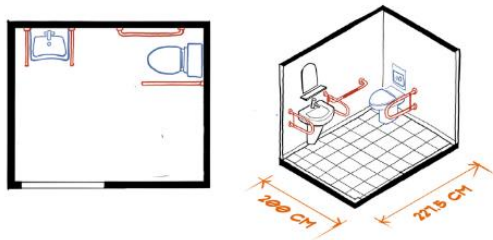
Gambar 9. *Layout* Eksisting Awal
(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2025)

Rekomendasi Desain Toilet Umum dan Difabel

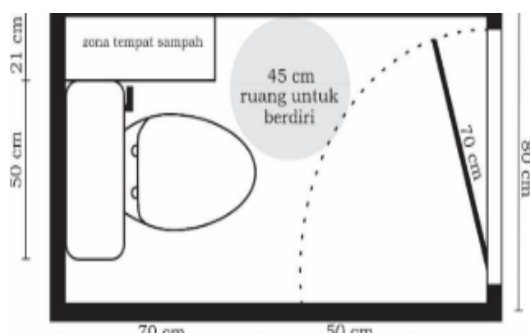
Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, desain akhir disusun dengan menekankan pemenuhan prinsip *Universal Design* melalui penyediaan toilet difabel yang terintegrasi dengan fasilitas toilet umum. Rekomendasi desain toilet difabel dirancang dengan menyediakan ruang manuver yang memadai bagi pengguna kursi roda, sirkulasi masuk-keluar tanpa hambatan, serta penataan elemen sanitasi yang memungkinkan penggunaan secara mandiri. Penempatan kloset, wastafel, dan bukaan pintu dirancang agar mudah dijangkau oleh pengguna dengan mobilitas terbatas.

Untuk memperkuat aspek aksesibilitas, rekomendasi desain ini mengacu pada ketentuan Permen PUPR No. 14/PRT/M/2017 serta Panduan Ilustratif Regulasi Bangunan & Kawasan Jakarta: Desain *Universal*, khususnya terkait kebutuhan ruang manuver pengguna kursi roda, lebar bukaan pintu, serta jarak jangkauan perlengkapan sanitasi. Penerapan dimensi minimum tersebut bertujuan

memastikan bahwa toilet difabel tidak hanya tersedia secara fisik, tetapi juga dapat digunakan secara aman, nyaman, dan mandiri oleh seluruh pengguna.

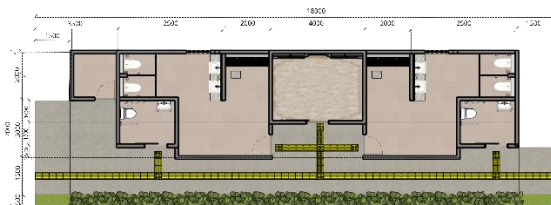


Gambar 10. Dimensi Toilet Difabel
(Sumber: Panduan Ilustratif Regulasi Bangunan & Kawasan Jakarta: Desain Universal, 2025)



Gambar 11. Dimensi Toilet Umum
(Sumber: Permen PUPR No. 14/PRT/M/2017)

Perubahan *layout* juga dilakukan dengan menyederhanakan pola ruang, serta meningkatkan keterbatasan akses menuju bilik toilet. Upaya ini ditujukan untuk menciptakan lingkungan sanitasi yang lebih inklusif, intuitif, dan nyaman bagi seluruh kelompok pengguna.



Gambar 12. Layout Rekomendasi
(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2025)

Rekomendasi Desain Musholla

Selain fasilitas toilet, rekomendasi desain juga diterapkan pada fasilitas musholla. Pada kondisi eksisting, keterbatasan akses dan tata ruang musholla berpotensi menyulitkan pengguna dengan keterbatasan fisik. Oleh karena itu, desain akhir musholla disusun

dengan mempertimbangkan akses tanpa hambatan, perbedaan elevasi yang minimal, serta hubungan ruang yang jelas antara area wudu dan ruang salat. Penataan ini ditujukan untuk memudahkan orientasi ruang dan pergerakan pengguna, khususnya lansia dan penyandang disabilitas.

Pemisahan yang jelas antara area basah dan area kering juga diterapkan untuk menjaga kenyamanan dan keamanan pengguna. Rekomendasi desain musholla ini mengacu pada prinsip *Universal Design* dengan menekankan kemudahan akses, keterbacaan ruang, serta fleksibilitas penggunaan tanpa menghilangkan fungsi utama ruang ibadah.

Perbandingan antara desain eksisting dan desain akhir menunjukkan adanya kesenjangan antara perancangan fasilitas di lapangan dengan ketentuan aksesibilitas yang telah ditetapkan, termasuk Permen PUPR No. 14/PRT/M/2017 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Temuan ini menegaskan bahwa aspek aksesibilitas belum sepenuhnya terintegrasi dalam perancangan amenities ruang publik. Dengan demikian, rekomendasi desain yang diusulkan dapat dimaknai sebagai upaya penguatan pendekatan perancangan yang lebih inklusif dan dapat diterapkan pada konteks ruang publik perkotaan lainnya.

Sintesis Pembahasan

Berdasarkan pembahasan terhadap fasilitas toilet umum, toilet difabel, dan musholla, dapat disimpulkan bahwa permasalahan amenities di Taman Hutan Kota GBK tidak berdiri secara terpisah. Keterbatasan kapasitas, ketiadaan fasilitas aksesibel, serta kurangnya kenyamanan fasilitas ibadah menunjukkan adanya defisit inklusivitas amenities ruang publik. Kondisi ini menjadi dasar penting dalam perumusan usulan pengembangan dan redesain fasilitas yang berorientasi pada prinsip *Universal Design*.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa amenities ruang publik di Taman Hutan Kota

Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, khususnya fasilitas toilet umum, toilet difabel, dan musholla, belum sepenuhnya memenuhi prinsip *Universal Design* serta standar perancangan fasilitas publik yang berlaku. Keterbatasan jumlah dan kapasitas toilet umum, ketiadaan toilet difabel, serta musholla dengan luasan dan fasilitas pendukung yang terbatas menunjukkan adanya defisit inklusivitas *amenities* ruang publik.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa prinsip *equitable use* dan *size and space for approach and use* menjadi aspek yang paling belum terpenuhi, terutama pada fasilitas sanitasi dan ibadah. Kondisi ini berpotensi membatasi aksesibilitas, kenyamanan, dan kemandirian pengguna, khususnya penyandang disabilitas dan kelompok dengan kebutuhan khusus. Jika dikaitkan dengan standar perancangan seperti Neufert, Permenkes, serta ketentuan aksesibilitas dalam Permen PUPR dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, fasilitas eksisting belum mampu mengakomodasi kebutuhan pengguna secara setara. (Greed, 2003)

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan kualitas *amenities* di Taman Hutan Kota GBK tidak hanya berkaitan dengan penambahan fasilitas secara kuantitatif, tetapi juga memerlukan pendekatan perancangan yang berorientasi pada *Universal Design* dan kesesuaian terhadap standar, sebagai dasar dalam mewujudkan ruang publik yang inklusif.

Saran

Berdasarkan simpulan penelitian, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan fasilitas toilet umum di Taman Hutan Kota GBK perlu mempertimbangkan kecukupan jumlah bilik dan ruang gerak pengguna sesuai standar perancangan toilet publik, guna mengantisipasi peningkatan intensitas pengunjung dan mencegah terjadinya antrean pada waktu penggunaan tinggi.
2. Penyediaan toilet difabel perlu menjadi prioritas utama dalam pengembangan *amenities* ruang publik. Perancangan toilet difabel hendaknya mengacu pada prinsip

Universal Design serta ketentuan aksesibilitas dalam Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2017, sehingga fasilitas sanitasi dapat digunakan secara mandiri dan setara oleh penyandang disabilitas.

3. Peningkatan kualitas musholla sebagai fasilitas ibadah publik perlu dilakukan melalui pengaturan ulang kapasitas ruang, orientasi pintu, serta penambahan fasilitas pendukung seperti area wudu yang memadai, agar musholla dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan akses bagi seluruh pengguna.

DAFTAR PUSTAKA

- Carmona, M., Heath, T., Oc, T., & Tiesdell, S. (2008). *Public Places - Urban Spaces The Dimensions of Urban Design*.
- Carr, S., Francis, M., Rivlin, L., & Stome, A. (1991). *Public Space*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Ching, F. D. (2008). *Arsitektur : Bentuk, Ruang, dan Tataan Edisi Ketiga*. Penerbit Erlangga.
- Greed, C. (2003). *Inclusive Urban Design: Public Toilets (1st ed.)*. Routledge.
- Imrie, R., & Hall, P. (2001). *Inclusive: Designing and Developing Accessible Environments*. Spon Press.
- Kementerian Kesehatan. (2014). Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2014 tentang *Sanitasi Total Berbasis Masyarakat*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/116706/permenkes-no-3-tahun-2014>
- Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. (2017). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat No.14/PRT/M2017 tentang *Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung*.
- Mustikasari, W., Damayanti, C., & Maun, R. (2024). *Panduan Ilustratif Regulasi Bangunan & Kawasan Jakarta: Desain Universal*. Jakarta.
- Neufert, E. (2019). *Architects' Data (4th ed.)*. Oxford: Wiley-Blackwell.

Organization, W. H. (2022). *Global report on health equity for persons with disabilities*. World Health Organization.

Putri, R. A., & Rahmi, D. (2021). Penerapan prinsip *Universal Design* pada taman kota sebagai ruang publik inklusif. *Jurnal Koridor*, 45-46.

Steinfeld, E., & Maisel, J. (2012). *Universal Desain* (1st ed.). Wiley.

Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37251/uu-no-8-tahun-2016>